PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH
(Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2011-2015)

Pembimbing:
Helena Rizqia, SE., MM

Oleh:
Shelvy Novyanty
21113209

Universitas Komputer Indonesia

Abstract

This study aims to determine the effect of district own source revenue and general allocation fund to regional expenditure in West Java Province.

This study was a quantitative research using secondary data obtained from data collection through document at Central Bureau of Statistics of West Java Province. To know thw effect district own source and general allocation fund to regional expenditure, this research uses descriptive and verification method. The analytical method used is multiple linear regression with SPSS version 16 application.

The results of this study indicate that the variables of district own source revenue significantly effect the regional expenditure. Similarly, general allocation funds affect regional expenditure.

Keyword: District Own Source Revenue, General Allocation Fund, Regional Expenditure

---

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap tahun kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah selalu meningkat, konsekuensinya besar dana yang diperlukan untuk belanja daerah pun selalu meningkat (Sahya Anggara, 2016:327).

Setiap pengeluaran untuk Belanja Daerah atas beban (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersbut. Pengeluaran kas yang menjadi beban Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) tidak boleh dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan kepala daerah (Sujarweni, 2015:68).

Adapun permasalahan di tahun anggaran 2017 di Kota Depok yaitu untuk pendapatan daerah terjadi penurunan dan belanja daerah mengalami kenaikan. Perbedaan antara pendapatan dan belanja daerah itu membuat Kota Depok mengalami defisit. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah (Mohammad Idris (Walikota Depok), 2017).

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi kebergantungan terhadap pembiayaan dari Pemerintah Pusat sehingga meningkatkan penyelenggaraan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah tidak sama karena bergantung pada potensi daerah dan kemampuan pengelolaannya. Meskipun daerah diberi otonomi seluas-luasnya pada umumnya besaran Pendapatan Asli Daerah jauh lebih kecil daripada bantuan yang diberikan pusat. Hal ini merupakan konsekuensi pengaturan kekuatan keuangan di negara kesatauan dalam keadaan bagaimanapun kekuatan keuangan pusat harus lebih besar daripada daerah untuk menjaga kebutuhan Negara (Sahya Anggara, 2016:339).

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan panggilan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 hanya Rp 930 miliar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 ditargetkan Rp 946 miliar atau hanya naik 2% saja. Kenaikan yang terlalu minim itu membuat sejumlah program pembangunan terpaksa harus ditunda karena keterbatasan anggaran, salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada di sektor pariwisata. Tetapi pihak eksekutif tidak pernah serius menanganinya (Sri Rahayu Agustina, Wakil Ketua DPRD Karawang, 2016).

Tujuan dari Dana Alokasi Umum yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Ahmad Yani, 2009:125).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disebutkan, penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU), didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang. Dengan kriteria seperti itu, Menkeu menetapkan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 untuk 169 daerah sebesar Rp19.418.975.064.500,00. Dalam lampiran PMK itu disebutkan, penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016. Dalam PMK itu disebutkan, dana alokasi umum yang sebagian penyalurannya ditunda itu dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi (Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), 2016).

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.
2. Seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Derah. Tujuan dari penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

1.3 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menjelaskan tentang dan kemudahan yang akan diperoleh dari hasil penelitian, serta bagi pihak-pihak yang akan diperoleh data dan informasinya dari hasil

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu baru. Khususnya bagi penulis dan umumnya bagi yang membaca hasil penelitian ini.

1.3.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak instansi pemerintah dan pemecahan masalah mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah.

1.3.2 Kegunaan Akademis

1. Peneliti/Penulis
   Penelitian ini berguna untuk mengembangkan pengetahuan dan menambah wawasan baru bagi penulis.
2. Bagi Universitas Komputer Indonesia
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian dalam penelitian.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Ida Nurchaida, dkk (2015:2) adalah :

> "Pendapatan asli daerah adalah yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan daerah".

Dan Pendapatan Asli Daerah menurut Baldric Siregar (2015:31) adalah:

> "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah".

Kemudian definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Sahya Anggara (2016:326) adalah:

> "Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penerbitan objek-objek dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber yang ada di daerah, untuk keperluan daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun indikator Pendapatan Asli Daerah menurut Baldric Siregar (2015:31) meliputi :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2.1.2 Dana Alokasi Umum

Definisi Dana Alokasi Umum menurut Baldric Siregar (2015:144) adalah :

> "Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditujukan untuk memeratakan kemampuan keuangan daerah secara horizontal".

Definisi Dana Alokasi Umum menurut Ida Nurchaida, dkk (2015:4) adalah :

> "Dana Alokasi Umum adalah transfer dana bagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan *fiscal* dan pemerataan kemampuan fiscal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat".

Kemudian definisi Dana Alokasi menurut Sembiring (2012:196) adalah :

> "Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuannya pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Definisi isi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berasal dari APBN untuk pemerataan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Adapun indikator Dana Alokasi Umum menurut (Sahya Anggara, 2016:326) indikator Dana Alokasi umum adalah Dana yang bersumber dari pendapatan bersih APBN atau pemerintah pusat.

2.1.3 Belanja Daerah

Definisi Belanja Daerah menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:57) adalah :

> "Belanja Daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah yang bersangkutan".

Definisi Belanja Daerah menurut Baldric Siregar (2015:31) adalah :

> "Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah".

Kemudian definisi Belanja daerah menurut Moh. Mahsun dkk (2013:83) adalah :

> "Belanja Daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan".

Berdasarkan definisi diatas dapat dismpulkan bahwa Belanja Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah selama periode anggaran yang mengakibatkan terjadinya utang sehingga berkurangnya ekuitas dana.

Adapun indikator Belanja Daerah menurut Moh. Mahsun, dkk (2013:97) meliputi :

1. Belanja Langsung
   a. Belanja Pegawai
   b. Belanja Barang dan Jasa
   c. Belanja Modal

2. Belanja Tidak Langsung
   a. Belanja Pegawai
   b. Belanja Bunga
   c. Belanja Subsidi
   d. Belanja Hibah
   e. Bantuan Sosial
   f. Belanja Bagi Hasil
   g. Bantuan Keuangan
   h. Belanja Tidak Terduga

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut (Sahya Anggara, 2016:327) Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah yang menyatakan :

> "Sumber Pendapatan Daerah berupa (PAD) berepengaruh terhadap Belanja. Besaran Belanja Daerah bergantung pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah".

Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Syukriy Abdulah dan Afrah Junita (2016) yang berjudul Bukti Empiris Tentang Pengaruh *Budget Ratcheting* Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Aceh**,** menyatakan bahwa :

> "Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah".

Pernyataan ini juga diperkuat oleh penelitian Kiki Ninda Apriliawati dan Nur handayani (2016) yang menyatakan bahwa :

> "Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah".

Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula Belanja Daerah yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Menurut Abdullah & Halim (2003:20) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah menyatakan bahwa :

> "Terjadi transfer yang cukup signifikan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini, apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Semakin besar Dana Alokasi Umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah".

Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Juwari, Djoko Setyadi dan Yana Ulfah (2016) yang berjudul Pengaruh Pajak dan Retribusi Serta DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan, menyatakan bahwa :

> "Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD)".

Pernyataan ini juga diperkuat oleh penelitian Yefisron, Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc dan Dr., Muhammad Nasir, M.Si, MA (2016) yang menyatakan bahwa :

> "Hasil estimasi antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada kabupaten induk maupun pemekarannya di Propinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah".

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah
H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2.1 Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan variabel dependen Belanja Daerah. Adapun tabel operasionalisasi sesuai dengan kedua variabel tersebut adalah:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala
Variabel (x_1) Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. (Baldric Siregar, 2015:31)	a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Baldric Siregar, 2015:31)	Rasio
Variabel (x_2) Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum adalah transfer dana bagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. (Ida Nurchaida, dkk , 2015:4)	Dana yang bersumber dari pendapatan bersih APBN atau pemerintah pusat. (Sahya Anggara, 2016:326)	Rasio
Variabel (y) Belanja Daerah	Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperolehpembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. (Baldric Siregar, 2015:31)	a. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung (Baldric Siregar, 2015:31)	Rasio

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) menyatakan bahwa:

> "Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan".

Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan digunakan sebagai teknik pengumpulan data secara langsung pada instansi yang menjadi objek dalam penelitian dengan dokumentasi, penelitian kepustakaan dan riset internet.

3.4 Populasi, Sampel, Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.1 Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

3.4.2 Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* jenis *probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau sering disebut sensus.

Tabel 3.2
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dijadikan Sampel

No	Kabupaten	No	Kota
1	Kabupaten Cianjur	5	Kota Cirebon
2	Kabupaten Bandung	6	Kota Cimahi
3	Kabupaten Majalengka		
4	Kabupaten Subang		

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017)

Berdasarkan Tabel 3.2 yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 4 Kabupaten dan 2 Kota dengan 5 periode Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sehingga jumlah sampel 30 (6Kabupaten/Kota x 5 tahun realisasi penerimaan dan pengeluaran).

3.4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian pada Provinsi Jawa Barat dengan pengambilan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2017 sampai dengan Juli 2017. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ke tahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.

Uji normalitas menurut V. Wiratna (2015:120) adalah :

> "Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik".

Dasar pengambilan keputusan menurut V. Wiratna (2015:225) bisa dilakukan berdasarkan signifikannya, yaitu :

1. Jika signifikan > 0,05 maka variabel berdistribusi normal.
2. Jika signifikan < 0,05 variabel tidak berdistribusi normal.

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien.

Menurut V. Wiratna (2015:226) uji heterokedastisitas adalah :

> "Uji heterokedastisitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas".

Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan metode *scatter plot*, dengan kriteria hasil sebagai berikut :

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan. Penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah.

3.6.2 Analisis Verifikatif

Analisis Verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu *statistical package for social science* (SPSS) versi 16. Analisis verifikatif digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Jawa Barat. Serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

3.6.3 Pengujian Hipotesis

Menurut Andi Supangat (2007:293) yang dimaksud dengan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Salah satu cara dalam statistika untuk menguji "parameter" populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikansi tertentu. Pada prinsipnya pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan atau pembenaran dari masalah yang akan ditelaah. Sebagai wahana untuk menetapkan kesimpulan sementara tersebut kemudian ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya."

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah

Berdasarkan hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah, besaran Belanja Daerah bergantung pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah. Besar

presentase pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah yaitu sebesar 32.94%, yang mempunyai arti bahwa 32.94% Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya sebesar 67.06% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti dana bagi hasil yang memberikan kontribusi terhadap belanja daerah.

4.1.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian presentase pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah yaitu sebesar 45.42%, yang mempunyai arti bahwa 45.42% Belanja Daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya sebesar 54.58% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti dana alokasi khusus yang memberikan kontribusi terhadap belanja daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada 6 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode tahun 2011-2015. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah yang akan di terima akan semakin tinggi.
2. Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima, maka semakin tinggi Belanja daerah yang diterima.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Pemda/Pemkot pada 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat hendaknya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kemampuan daerah agar dapat dipergunakan untuk keperluan daerah terutama bagi kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dan pemerintah daerah harus bisa mengurangi pengeluaran yang tidak begitu penting karena akan mengurangi pendapatan pada daerah masing-masing alangkah baiknya dipergunakan untuk hal yang benar-benar penting.
2. Untuk meningkatkan Dana Alokasi Umum pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan dana dari APBN agar terealisasi dengan baik. Dan pemerintah daerah yang masih mendapatkan Dana Alokasi Umum yang kurang dari APBN maka jika dinaikkan dana dari pemerintah maka tidak akan terjadi ketidakseimbangan terlalu jauh dengan pemerintah daerah lain.

5.2.2 Saran Akademik

1. Bagi Pengembangan Ilmu
   Dalam penelitian ini hanya mengambil dua variabel independen, sehingga belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi Belanja Daerah. Oleh karena itu, perlu ditambah variabel yang mempengaruhi belanja daerah seperti pajak daerah dan dana perimbangan lainnya.
2. Bagi Peneliti Lain
   Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel, unit analisis dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. 2007. *Statistika dalam Kajian Deskriftif, Inferensi dan Nonparametrik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ahmad Yani, 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2015. *Statistik Indonesia Tahun 2011-2015*. Bandung. Badan Pusat Satistik.

Halim, A. 2003. *Akuntansi Keuangan Daerah,* Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Juwari, Djoko Setyadi, Yana Ulfah, 2016. *Pengaruh Pajak Dan Retribusi Serta DAU Dan DAK Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Kalimantan*. ISSN (Print) 2086-1117 Jurnal Geo Ekonomi Volume 13 No. 01 Maret 2016. Melalui jurnal.uniba-bpn.ac.id, diakses pada tanggal 30 Desember 2016.

Moh. Mahsun, Firma Sulistiyowati, Heribertus Andre Purwanugraha. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

Sahya Anggara. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Syukriy Abdullah dan Afrah Junita, 2016. *Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Aceh*. ISSN 0852-1875 MODUS Vol.28(2):185-201, 2016.

Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah).* Fokusmedia : Bandung

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).*Bandung : Alfabeta

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

_____. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Yefirson, Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc, Dr. Muhammad Nasir, M.Si, MA 2015. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Induk Dan Kabupaten Pemekarannya Di Provinsi Sumatera Barat*. ISSN 2302-0172 Jurnal Ilmu ekonomi Volume 3, No. 1, Februari 2015.